

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi serta pelaksanaan pengembangan drainase lingkungan dalam mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan di Desa Jaya Mulya. Berdasarkan enam indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, pengembangan drainase di Desa Jaya Mulya menunjukkan hasil yang terbatas dan belum optimal. Dari sisi efektivitas, sistem drainase yang ada belum mampu sepenuhnya menanggulangi risiko banjir, karena genangan air sering muncul di berbagai titik, terutama saat hujan deras dan volume air meningkat secara mendadak. Meskipun pemerintah desa telah mengalokasikan berbagai sumber daya, baik berupa pembangunan infrastruktur, anggaran perawatan, maupun tenaga teknis, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan kinerja drainase yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana fisik saja tidak cukup, melainkan perlu didukung dengan pengelolaan yang tepat, pemeliharaan rutin, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga saluran tetap bersih dan berfungsi optimal.

Dari sisi efisiensi, penggunaan sumber daya, baik tenaga, anggaran, maupun waktu, belum menghasilkan hasil yang proporsional. Beberapa titik saluran yang rawan mengalami penyumbatan memerlukan intervensi berulang, sehingga tenaga yang dikerahkan terkadang terpakai berlebihan hanya untuk menangani masalah yang seharusnya bisa dicegah melalui perencanaan dan pemeliharaan yang lebih baik. Proses koordinasi antara pemerintah desa, RW/RT, PPSU, dan pengembang juga belum sepenuhnya lancar, sehingga terjadi redundansi pekerjaan atau keterlambatan respon terhadap kerusakan saluran. Efisiensi yang terbatas ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya, meskipun ada, belum digunakan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan sistem drainase. Selain itu, manfaat program drainase belum dirasakan secara merata di seluruh desa. Beberapa wilayah yang dekat dengan saluran utama atau titik prioritas memang mendapatkan pelayanan yang lebih baik, tetapi di beberapa titik rawan banjir, masyarakat masih sering menghadapi genangan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat, yang berpotensi

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap program pemerintah desa.

Respons pemerintah desa terhadap permasalahan banjir juga masih tergolong lambat. Tindakan yang diambil untuk menangani saluran tersumbat atau memperbaiki kerusakan sering dilakukan setelah masalah muncul, sehingga sifatnya lebih reaktif daripada preventif. Keterlambatan ini memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan drainase secara keseluruhan, dan mengurangi kemampuan desa dalam mengantisipasi genangan yang terjadi secara periodik. Terakhir, pelaksanaan pengembangan drainase belum selalu tepat waktu dan sesuai sasaran. Beberapa proyek pembangunan atau perbaikan saluran tertunda karena keterbatasan anggaran atau tenaga, sedangkan titik-titik rawan yang seharusnya menjadi prioritas kadang baru ditangani setelah banjir terjadi. Ketidaktepatan ini mengakibatkan tujuan utama program, yaitu pengendalian banjir dan peningkatan kualitas hidup warga, belum tercapai secara maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan enam indikator evaluasi, pengembangan sistem drainase di kawasan perumahan perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Dari aspek efektivitas, pemerintah desa dan pengembang perlu memastikan bahwa saluran drainase benar-benar mampu mengurangi genangan melalui evaluasi kapasitas dan pemeliharaan rutin. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran dan tenaga harus dilakukan secara terencana dan berbasis prioritas wilayah rawan banjir agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Dalam hal kecukupan, dimensi dan jaringan drainase perlu disesuaikan dengan pertumbuhan kawasan dan perubahan tata guna lahan, termasuk penyediaan area resapan air. Pemerataan pembangunan juga penting agar seluruh wilayah perumahan memperoleh perhatian yang sama dan tidak terjadi ketimpangan kualitas lingkungan. Responsivitas pemerintah perlu ditingkatkan melalui mekanisme pelaporan yang cepat dan tindak lanjut yang jelas, tidak hanya bersifat reaktif saat banjir terjadi. Sementara itu, ketepatan kebijakan harus berbasis data teknis dan perencanaan yang matang agar intervensi yang dilakukan benar-benar menasar akar permasalahan serta mendukung keberlanjutan lingkungan permukiman.